

## IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BUDI PEKERTI PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI SURABAYA BARAT

**Suprayoga, Indra Prasetyo**

Universitas Wijaya Putra

suprayoga@uwp.ac.id

### Abstrak

Upaya untuk mencapai tujuan pendidikan, baik dalam pengembangan kecerdasan dan kecakapan maupun pengembangan karakter peserta didik, yang dilakukan sekolah-sekolah selama ini masih banyak terjadi ketimpangan. Proses pendidikan di sekolah masih bertumpu pada pengembangan intelektual akademik peserta didik. Sementara Pengembangan karakter masih terabaikan. Akibatnya, telah banyak ditemukan berbagai perilaku negatif peserta didik, baik pada saat masih berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah sehingga diperlukan upaya yang lebih serius dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan pendidikan, khususnya dalam pengembangan perilaku atau pendidikan budi pekerti bagi peserta didik. Karena belum ada pedoman pelaksanaan yang terstruktur, sistematis dan implementatif yang bisa dievaluasi. Luaran yang ditargetkan melalui kegiatan ini adalah implementasi pendidikan budi pekerti di sekolah mitra yang terstruktur, sistematis dan implementatif. Metode pelaksanaan melalui seminar dan diskusi, workshop dan simulasi, pelatihan dan praktek serta pendampingan. Hasil yang dicapai, antara lain: Pemahaman tentang teori, konsep, dan prinsip-prinsip pendidikan budi pekerti, implementasi pendidikan budi pekerti yang terintegrasi dengan pengajaran akademik. Pelatihan Penggunaan Software / Sistem Informasi Manajemen untuk Pendidikan Budi Pekerti, Pengadaan 2 (dua) unit printer dan 2 (dua) unit Software yang diserahkan pada sekolah dan Pendampingan ke sekolah mitra. Dalam penerepannya Pendidikan Budi Pekerti diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pimpinan sekolah, guru dan masyarakat sekolah termasuk keluarga..

**Kata Kunci :** Pendidikan Budi Pekerti, Perilaku, Sekolah Menengah Pertama

### PENDAHULUAN

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang **beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia**, sehat, berilmu, cakap, **kreatif, mandiri** dan **menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung**

**jawab.** (UU Sisdiknas 20 Tahun 2003 bab II pasal 3)

Upaya untuk mencapai tujuan pendidikan, baik dalam pengembangan kecerdasan dan kecakapan maupun pengembangan karakter peserta didik, yang dilakukan sekolah-sekolah selama ini masih banyak terjadi ketimpangan. Proses pendidikan di sekolah masih bertumpu pada pengembangan intelektual akademik peserta didik. Sementara Pengembangan karakter (yang menurut pemahaman kami

merupakan pengembangan perilaku atau budi pekerti peserta didik) masih terabaikan.

Upaya untuk mencapai tujuan pendidikan khususnya dalam pengembangan intelektual akademik di sekolah-sekolah relatif sudah terlaksana dengan baik. Sekolah-sekolah dalam melaksanakan pembelajaran di dasarkan pada pedoman program kurikulum yang sudah ditetapkan pemerintah. Mulai dari struktur kurikulum, jenis-jenis mata pelajaran, bobot satuan pelajaran, alokasi waktu, standar kompetensi, sampai dengan penetapan kompetensi dasar sudah terakomodasi dalam silabus pelajaran (Permen No 41 tahun 2007 tentang standar proses). Dalam implementasinya, sekolah-sekolah telah mendapatkan pedoman pokok dari pemerintah yang sudah terstruktur, rinci dan jelas. Tentang standar penilaian setiap mata pelajaran dan penetapan hasil belajar peserta didik, sekolah-sekolah tidak kesulitan untuk menetapkan sekaligus mengembangkan berdasarkan pedoman pokok yang sudah ditetapkan pemerintah.

Namun demikian, upaya untuk mencapai tujuan pendidikan, khususnya dalam pengembangan perilaku atau pendidikan budi pekerti bagi peserta didik, saat ini pelaksanaannya masih belum mendapat perhatian secara serius. Karena pendidikan perilaku/pendidikan budi pekerti belum dilaksanakan dengan baik, maka perilaku sebagian peserta didik tidak mengembirakan.

Hampir semua sekolah sebenarnya sudah berupaya untuk menerapkan pendidikan karakter/akhlak mulia/budi pekerti/Perilaku, tetapi tidak terstruktur dan sistematis sehingga belum bisa diukur keberhasilannya, karena dari konsep yang telah ada belum dioperasionalkan menjadi indikator perilaku peserta didik yang bisa diukur, misalkan peserta didik yang disiplin itu indikatornya apa demikian juga yang dikatakan jujur, menghormati, peduli atau menjadi warga negara yang baik belum ada / belum ditentukan indikator untuk mengukur perilaku yang diharapkan. Karena belum ada indikator yang ditetapkan, maka sulit untuk dilakukan perekaman terhadap perilaku peserta didik baik yang negatif ataupun yang positif. Pada rapor

akademik yang ada saat ini, sudah memuat penilaian tentang perilaku peserta didik, namun nilai tentang perilaku tersebut tidak diperoleh dengan menggunakan instrumen baku. Permasalahan yang banyak dihadapi oleh sekolah diantaranya : 1) dari sisi pemahaman : belum adanya pemahaman yang sama antara pimpinan, guru dan orang tua tentang pendidikan budi pekerti; 2) dari sisi perencanaan : tidak ada / belum ada kurikulum pendidikan budi pekerti yang diintegrasikan dalam proses belajar mengajar maupun dengan kegiatan ekstrakurikuler; 3) dari sisi pengorganisasian : masih beragamnya komitmen dalam penanganan perilaku peserta didik, serta belum ada software / system informasi manajemen yang mampu menampung dan mengolah data perilaku peserta didik; 4) dari sisi pelaksanaan : adanya anggapan sebagai beban tambahan pekerjaan serta kesiapan sebagai contoh / teladan dalam berperilaku.

## **METODE PELAKSANAAN**

### **1. Seminar dan diskusi**

Upaya untuk mencapai tujuan pendidikan, khususnya dalam pengembangan sikap dan perilaku atau budi pekerti peserta didik, sampai saat ini pelaksanaannya masih belum mendapat perhatian secara serius. Selama ini pelaksanaan pendidikan budi pekerti masih banyak menemui kendala. Sejumlah kendala yang muncul dalam pelaksanaan pendidikan budi pekerti, pertama, belum didapatnya pedoman-pedoman pendidikan budi pekerti yang implementatif. Kedua, secara operasional belum adanya persamaan persepsi tentang pendidikan budi pekerti oleh kepala sekolah, guru, karyawan, beserta orang tua peserta didik. Oleh karenanya diperlukan kehadiran pakar / nara sumber untuk memberikan pencerahan tentang kerangka teori, konsep, dan prinsip-prinsip pendidikan budi pekerti.

### **2. Workshop & Simulasi**

Sebagai salah satu bentuk upaya pengembangan intelektual peserta didik, sekolah melaksanakan pembelajaran sebagaimana yang tertuang di dalam

kurikulum. Guru mengajarkan mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku atau sesuai dengan ketentuan Kemendiknas.

Dalam mengembangkan budi pekerti peserta didik, sampai saat ini secara umum sekolah-sekolah belum menjalankan secara maksimal. Banyak di antara sekolah-sekolah yang belum, bahkan tidak memiliki program pelaksanaan pengembangan pendidikan budi pekerti secara terencana, terorganisasi, terimplementasi dengan jadwal yang tepat, dan terevaluasi secara tepat pula. Di sekolah-sekolah yang ada, juga masih banyak yang dalam melaksanakan pendidikan budi pekerti peserta didik tidak dilakukan dengan mengaitkan pilar-pilar yang dianggap berguna untuk kehidupan peserta didik, seperti halnya mengaitkan dengan perilaku dapat dipercaya, tanggung jawab, menghormati, peduli, sportif, dan menjadi warga negara yang baik, dan lain-lain.

Untuk mencapai tujuan pendidikan budi pekerti tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya sekadar menerapkan kurikulum akademik secara berlebihan. Akan tetapi, juga harus menerapkan pendidikan budi pekerti secara sungguh-sungguh sekaligus terencana. Disadari atau tidak, pelaksanaan pendidikan budi pekerti di sekolah-sekolah cenderung hanya diberikan secara seadanya, tidak terstruktur, atau tidak terevaluasi secara benar.

Oleh karena itu, perlu dirancang penyelenggaraan pendidikan yang seimbang antara aspek pengembangan intelektual dan aspek pengembangan karakter dan budi pekerti melalui pengembangan perilaku. Keseimbangan kedua aspek tersebut tidak hanya terdapat dalam kurikulum, tetapi hendaknya diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Para pendidik harus sepakat bahwa implementasi pendidikan budi pekerti di sekolah-sekolah dapat membangun etika, kemampuan bersosialisasi, dan meningkatkan kemampuan akademik peserta didik.

Karena itu perlu disusun kurikulum Pendidikan budi pekerti yang memuat indikator yang bisa diukur yang berhubungan dengan nilai-nilai kejujuran, tanggungjawab, menghormati, peduli, sportif, dan sebagai warga Negara yang baik.

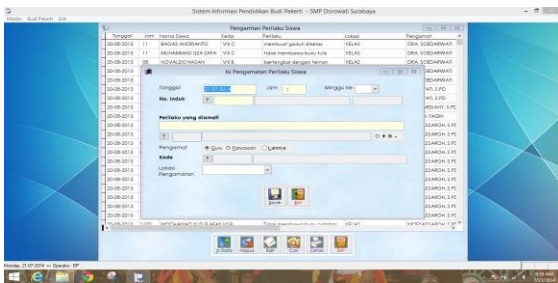
Sekolah yang menjalankan program pendidikan budi pekerti, harus menunjukkan bukti dalam membangun lingkungan sosial yang positif, memiliki karakter kepemimpinan kolegialitas, serta memiliki keterikatan yang utuh dengan keluarga dan lingkungan sekitar peserta didik. Pendidikan budi pekerti diharapkan dapat memupuk rasa berketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, demokrasi, dan punya rasa keadilan sosial yang seluruhnya terinternalisasi dalam diri setiap masing-masing peserta didik.

### **3. Pelatihan dan Praktek**

Software yang dipergunakan dalam pelaksanaan pendidikan budi pekerti ini mengadopsi software yang telah dilaksanakan di sekolah Wijaya Putra selama 5 tahun, dengan beberapa modifikasi disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, khususnya menu laporan dan pembuatan raport pendidikan budi pekerti.

Dalam melaksanakan pendidikan budi pekerti maka perlu adanya pemahaman tentang mekanisme pengumpulan dan pengolahan data pengamatan perilaku peserta didik kepada seluruh masyarakat sekolah termasuk sosialisasi kepada peserta didik dan orang tua siswa. Selain itu juga memberikan pelatihan khususnya pada operator, BP/BK, Wali kelas dan pimpinan tentang pengoperasian penggunaan software sistem informasi manajemen pendidikan budi pekerti.

Pelatihan untuk operator diutamakan dari menginput data amatan perilaku siswa, membaca amatan perilaku per siswa, per indikator baik data per hari, pekan, semester sampai dengan lulus. Untuk BP/BK dan guru difokuskan pada kemampuan membaca siswa yang paling banyak amatan sampai dengan yang paling minim amatan serta indikatornya, diharapkan dapat membantu proses klinis maupun komunikasi dengan orang tua, selain itu juga sebagai bahan evaluasi dan mencari jalan keluar.



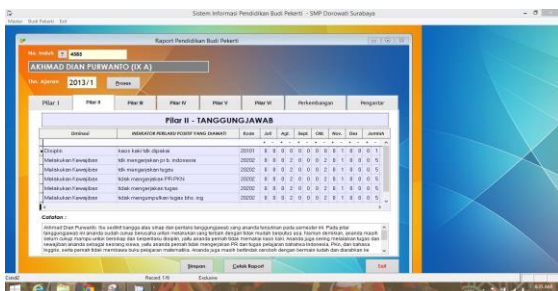
Gambar 1: Input data amatan perilaku siswa dari guru / karyawan



Gambar 5 : Rapor Pendidikan Budi Pekerti



Gamabr 2: Rekap amatan siswa mingguan (bahan feed back)



Gambar 3: Mendiskripsikan untuk rapor budi pekerti



Gambar 4: rekap amatan perilaku per siswa dalam satu semester

## 4. Pendampingan

Dalam kegiatan pendampingan ini lebih menitik beratkan pada proses pengamatan perilaku siswa mana yang perlu dicatat di kartu amatan dan mana yang tidak khususnya kepada guru serta mengingatkan guru agar indikator yang telah dirancang dalam RPP ketika mengajar di kelas maupun di luar kelas juga menjadi perhatian dalam pengamatannya, mendampingi operator dalam proses input data amatan dari guru & karyawan untuk di entry pada sistem informasi manajemen Pendidikan Budi Pekerti, selain itu mendampingi wali kelas pada saat umpan balik dari hasil pengamatan selama satu minggu, serta penanganan siswa yang bermasalah baik oleh wali kelas maupun dengan BP/BK. Selain itu juga memberikan pendampingan cara mendiskripsikan perilaku yang terekam dalam sistem untuk pembuatan raport pendidikan budi pekerti

## HASIL YANG DICAPAI

Setelah mendapatkan pencerahan melalui seminar dan diskusi tentang pendidikan budi pekerti dan implementasinya terhadap kurikulum 2013, maka dipahami tentang teori, konsep, dan prinsip-prinsip pendidikan budi pekerti sebagai berikut :

## Kerangka Teori Pendidikan Budi Pekerti

Di antara beberapa pendapat tentang perkembangan diri manusia, ada dua pendapat yaitu bahwa manusia lahir bersih putih sebagai kertas yang belum tertulis. Pendapat yang lainnya yaitu bahwa manusia lahir sudah memiliki bawaan-bawaan tertentu yang ada di dalam dirinya.

Menurut John Locke (Tirtarahardja, 2005:194) dengan teori Empirisme-nya menyatakan bahwa anak lahir di dunia bagai kertas putih yang bersih. Pengalaman empirik yang diperoleh dari lingkungan akan berpengaruh besar dalam menentukan perkembangan diri anak.

Pemikiran John Locke tersebut, bertolak belakang dengan kelompok aliran Nativisme, sebagaimana yang dikemukakan oleh Schopenhauer (Tirtarahardja, 2005:196), yang menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Dengan kata lain, bayi itu lahir sudah dengan pembawaan baik dan pembawaan buruk.

Di samping kedua aliran di atas, masih ada aliran ketiga, yaitu aliran konvergensi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh William Stern (Tirtarahardja, 2005:198), bahwa seorang anak lahir di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Dalam proses perkembangan anak tersebut baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu.

Terhadap teori konvergensi tersebut tentunya dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam pelaksanaan pendidikan, termasuk pendidikan budi pekerti di sekolah. Hal ini mengingat bahwa melaksanakan pendidikan budi pekerti sudah barang tentu tidak bisa hanya mementingkan bakat bawaan atau mementingkan faktor lingkungan tetapi keduanya saling berinteraksi.

Agar pendidikan dapat berhasil dengan baik maka pendidik harus mengetahui bakat-bakat yang dimiliki oleh peserta didik untuk kemudian dapat dilakukan upaya agar bakat-bakat tersebut bisa berkembang dengan baik di lingkungan yang mendukung.

### **Kerangka Konseptual Pendidikan Budi Pekerti**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa karakter adalah bawaan, hati, jiwa,

kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan watak (Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995).

Konsep budi pekerti dalam pedoman ini diambil dari Balitbang Dikbud (1995) yang menjelaskan bahwa budi pekerti secara konseptual adalah budi yang dipekerjakan (dioperasionalkan, diaktualisasikan, atau dilaksanakan) dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan pribadi, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Budi pekerti secara operasional merupakan suatu perilaku positif yang dilakukan melalui kebiasaan. Artinya, seseorang diajarkan sesuatu yang baik mulai dari masa kecil sampai dewasa melalui latihan-latihan, misalnya, cara berpakaian, cara berbicara, cara menyapa dan menghormati orang lain, cara bersikap menghadapi tamu, cara makan dan minum, cara masuk dan keluar rumah, dan sebagainya.

Dari konsepsi tersebut di atas, karakter mempunyai cakupan yang amat luas. Apabila pendidikan karakter itu dilakukan di sekolah maka sangat sulit untuk diimplementasikan. Sebab konsep-konsep yang ada di dalam definisi karakter tersebut masih belum dapat dilihat indikator-indikator dari setiap konsepnya. Oleh sebab itu, dalam pendidikan karakter yang dapat dilakukan di sekolah adalah menggunakan konsep pendidikan budi pekerti.

Dalam pendidikan budi pekerti yang bisa dilakukan adalah mengubah, mengarahkan perilaku peserta didik dan perilaku-perilaku ini secara spesifik dapat dilihat indikator-indikatornya. Oleh karena itu, dalam membangun karakter bangsa yang perlu dididikkan kepada peserta didik, adalah mendidik budi pekerti dengan cara memahami, mengarahkan, mengubah untuk menjadikan perilaku-perilaku peserta didik yang lebih positif atau lebih baik.

### **Prinsip-prinsip Pendidikan Budi Pekerti**

Pada hakikatnya, pendidikan bertujuan mengarahkan peserta didik agar mempunyai pengetahuan yang luas, sekaligus memiliki perilaku yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, peserta didik selain membutuhkan pendidikan akademik juga membutuhkan pendidikan budi pekerti sebagai

landasan pengembangan diri dan landasan untuk berhubungan dengan orang lain sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan yang dapat diterima masyarakat. Adapun prinsip-prinsip pendidikan budi pekerti adalah sebagai berikut:

Prinsip 1 : Pendidikan budi pekerti mengutamakan nilai-nilai etika sebagai fondasi terbentuknya perilaku yang baik.

Prinsip 2 : Pendidikan budi pekerti harus didefinisikan secara komprehensif, termasuk pikiran, perasaan, dan perilaku, yang dapat ditampakkan, dapat didengarkan, serta dapat dirasakan baik oleh diri sendiri maupun orang lain.

Prinsip 3 : Pendidikan budi pekerti dapat berhasil jika ada perhatian yang sungguh-sungguh, proaktif dan dengan pendekatan komprehensif dari semua komponen yang berada di sekolah mulai dari pimpinan sekolah, guru, sampai dengan karyawan.

Prinsip 4 : Sekolah harus merupakan kesatuan masyarakat sekolah yang amat peduli terhadap anggotanya.

Prinsip 5 : Untuk mengembangkan budi pekerti peserta didik, diperlukan moral action. Moral action dalam hal ini bagi orang dewasa di dalam sekolah (pimpinan sekolah, guru, dan karyawan) harus menerapkan ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa dan tut wuri handayani.

Prinsip 6 : Pendidikan budi pekerti bisa efektif apabila kurikulum akademik yang diajarkan sangat bermakna bagi setiap peserta didik.

Prinsip 7 : Pendidikan budi pekerti harus dapat membangkitkan motivasi intrinsik peserta didik. Yang di maksud motivasi intrinsik, antara lain, timbulnya kesadaran peserta didik untuk mengubah perilaku dirinya menjadi lebih baik

Prinsip 8 : Pimpinan sekolah, guru, dan karyawan harus menjadi komunitas pembelajaran, berbagai tanggung jawab dalam pendidikan budi pekerti, dan harus menggunakan nilai-nilai yang sama dalam menuntun peserta didik dalam berperilaku positif.

Prinsip 9 : Pendidikan budi pekerti memerlukan *moral leadership* baik dari pemimpin sekolah, guru, maupun karyawan. *Moral leadership* baik dari pimpinan sekolah maupun guru yang mengajarkan berperilaku saling asih, asah, dan asuh.

Prinsip 10 : Pendidikan budi pekerti harus melibatkan orang tua atau wali siswa agar dapat dicapai kesamaan nilai-nilai yang diterapkan baik di sekolah maupun di rumah.

Prinsip 11 : Dalam mengevaluasi pendidikan budi pekerti harus diamati perubahan perilaku-perilaku yang ada di sekolah yaitu, perilaku pimpinan sekolah, guru dan karyawan, serta ada atau tidaknya perubahan-perubahan perilaku peserta didik, misalnya, dari yang kurang baik menjadi baik atau dari yang baik menjadi lebih baik.

### **Perencanaan Kurikulum Pendidikan Budi Pekerti**

Seperti yang telah kita pahami bahwa implementasi pendidikan budi pekerti seharusnya diintegrasikan dengan pengajaran akademik. Seorang guru yang mengajarkan mata pelajaran tertentu, misalnya, dituntut untuk menyusun silabus mata pelajaran yang diajarkan. Guru yang bersangkutan juga harus menyusun Rancangan Program Pengajaran (RPP), yang di dalamnya harus dimasukkan unsur-unsur pendidikan budi pekerti, atau pendidikan perilaku.

Dalam melaksanakan pendidikan budi pekerti pada dasarnya dapat dilaksanakan melalui penekanan-penekanan pada pilar-pilar tertentu. Dari

sejumlah pilar yang ada tentunya mengacu pada upaya-upaya peningkatan moral yang tinggi, akhlak yang mulia, serta budi pekerti yang luhur. Namun demikian, dalam pelaksanaan pendidikan budi pekerti di sekolah-sekolah, sementara ini dapat didasarkan pada enam pilar perilaku yang dapat dinilai secara nyata, sebagai berikut.

### **1. Dapat Dipercaya**

Inti sari dari pilar dapat dipercaya adalah seseorang dapat memegang dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Seseorang dapat dikategorikan dapat dipercaya apabila dalam melaksanakan tugas yang diembannya dengan jujur, berani, dan dapat diandalkan. Dalam menjalankan tugas dengan jujur, sebagai contoh, peserta didik tidak menyontek atau memberi suntikan kepada teman saat ulangan, atau peserta didik memplagiat karya orang lain, dll.

### **2. Pilar Tanggung Jawab**

Pada hakikatnya, pilar tanggung jawab atau *responsibility* merupakan suatu kewajiban individu untuk melaksanakan suatu ketentuan. Secara umum, tanggung jawab dapat dibagi menjadi dua jenis tanggung jawab, yaitu tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab moral merupakan bentuk tanggung jawab yang disepakati oleh masyarakat, dan apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tanggung jawab, sanksinya adalah dari masyarakat. Dalam pengertian lain, tanggung jawab moral adalah merupakan kontrak sosial. Sanksinya tidak lain adalah sanksi sosial (bukan sanksi hukum). Hal ini berbeda dengan tanggung jawab hukum, yakni kewajiban-kewajiban yang berlaku dibuat oleh lembaga negara yang berwenang mengatur masyarakat, dan apabila timbul hukuman pun dijatuhkan oleh suatu sistem peradilan di negara tersebut.

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab sebagai pilar dalam pendidikan budi pekerti, tentunya menggabungkan antara tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab moral yang menjadi indikator dari pilar tanggung jawab meliputi kewajiban-kewajiban moral yang dibuat oleh masyarakat sekolah yang diformulasikan sebagai bentuk kewajiban guna menciptakan serta

mengembangkan perilaku yang baik bagi peserta didik. Contohnya, peserta didik mengembalikan buku perpustakaan yang dipinjamnya dengan tepat waktu, atau peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru sesuai dengan perintah, dll.

Adapun bentuk-bentuk kewajiban moral ini memiliki keterkaitan dengan perilaku peserta didik di sekolah. Sedangkan tanggung jawab hukum yang menjadi indikator dalam pendidikan budi pekerti ini adalah bentuk-bentuk kewajiban hukum yang bersifat pelanggaran, dan bukan kejahatan. Contohnya adalah, peserta didik berkendara dengan cara-cara melanggar aturan berlalu lintas, dll.

### **3. Pilar Sikap Hormat**

Pilar menghormati memiliki ruang lingkup sebagai suatu penghormatan terhadap pihak lain. Dalam konteks ini, yang dimaksud pihak yang dihormati, antara lain, institusi maupun orang. Rasa hormat merupakan perwujudan dari pengakuan atas keberadaan institusi atau orang lain. Dalam hal penghormatan terhadap institusi yang harus dilakukan oleh peserta didik, antara lain, peserta didik menghormati simbol-simbol Negara, termasuk menghormati Sang Saka Merah Putih, menghormati Presiden dan Wakil Presiden sebagai simbol Negara.

Di samping menghormati institusi tersebut, dalam penghormatan terhadap orang lain. Pada pendidikan budi pekerti ini, peserta didik diarahkan berperilaku sopan dan toleran. Termasuk mengakui adanya perbedaan suku, ras, agama, maupun perbedaan sudut pandang. Sebagai contoh, peserta didik menerima adanya perbedaan pendapat dengan orang lain, atau peserta didik mengetuk pintu dan memberi salam ketika mereka masuk ruang Kepala Sekolah, dan meminta izin guru jika keluar atau masuk kelas pada saat proses belajar mengajar, dll.

Dalam perilaku menghormati orang lain, contohnya, peserta didik tidak mengajak teman berbicara pada saat mereka dijelaskan oleh guru, atau peserta didik mau menerima ide-ide yang baik dari teman atau orang lain.

### **4. Pilar Peduli**

Pilar peduli mempunyai banyak arti. Peduli dapat diartikan sebagai tindakan berhati-hati dengan melihat implikasi terhadap suatu perbuatan. Peduli

juga berarti sebagai suatu ketekunan seseorang dalam melaksanakan tanggung jawab yang melekat pada dirinya. Di samping itu, sikap peduli juga bermakna sebagai perhatian (respon) seseorang terhadap suatu kondisi yang sedang dihadapi.

Dalam kaitannya dengan pendidikan budi pekerti, sikap peduli difokuskan pada respon peserta didik terhadap kondisi yang dihadapi untuk mengasah rasa rendah hati, menolong, dan menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Rasa rendah hati dituangkan dalam sikap pemaaf sebagai respon terhadap suatu kesalahan dari pihak eksternal terhadap dirinya. Rasa menolong diimplementasikan sebagai suatu peran aktif peserta didik terhadap kesulitan yang dihadapi orang lain. Contoh, peserta didik memberi pinjaman uang kepada teman yang memerlukan, atau peserta didik membantu menjelaskan materi kepada teman yang belum mamahami, dll.

Sikap peduli yang diterapkan oleh peserta didik dengan menggunakan kaidah-kaidah keteraturan yang berlaku. Adapun menciptakan keteraturan ini, misalnya, peserta didik bersedia antri secara tertib di loket pembayaran uang sekolah, dll.

## 5. Pilar Sportif

Sikap sportif merupakan salah satu pilar penyangga karakter adil (Munir, 2010: 100). Sikap sportif, salah satu indikasinya, mengakui keunggulan dan kelebihan orang lain. Dalam menjalani interaksi sosial, seseorang dituntut untuk mengendalikan diri ketika ia harus mengakui keunggulan-keunggulan tertentu yang dimiliki orang lain, atau mungkin dalam bentuk kemenangan berada di pihak lain. Sikap sportif, contohnya, peserta didik mau mengakui keunggulan teman, termasuk memberi ucapan selamat kepada teman yang meraih prestasi lebih tinggi darinya, atau bersedia memintak maaf kepada teman ketika mereka melakukan kesalahan.

## 6. Pilar Warga Negara yang Baik

Pilar warga negara yang baik mengadopsi dari konsep *citizenship*. Dalam konsep *citizenship*, kedudukan manusia atau institusi sebagai bagian dari masyarakat. Dalam kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat, manusia atau institusi dapat

berkolaborasi dengan tatanan masyarakat baik dalam aspek budaya, sosial, ekonomi, hukum, maupun politik untuk menciptakan keharmonisan dalam bermasyarakat.

Di samping itu, pilar warga negara yang baik didasarkan pada konsep yang lebih mendasar, yakni konsep berwarga negara yang mencerminkan sikap dan perilaku berketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, demokrasi, dan punya rasa keadilan sosial yang seluruhnya terinternalisasi dalam diri setiap masing-masing peserta didik. Perilaku peserta didik dalam cerminannya berketuhanan Yang Maha Esa, antara lain, mereka selalu berdoa sebelum melaksanakan sesuatu, sebagai contoh, peserta didik melaksanakan doa sebelum dan sesudah menjalani proses belajar mengajar dalam kelas.

Dalam dimensi berkemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya, peserta didik menghargai guru atau sesama teman tanpa membedakan ras, suku, agama atau golongan satu sama lain.

Begitu juga perilaku mereka dalam dimensi persatuan, dapat dibuktikan, misalnya, ketika mereka melaksanakan tugas kelompok yang diberikan guru, mereka merencanakan, melaksanakan, serta mengkritisi kegiatan yang akan dilaksanakan bersama-sama tanpa ada rasa menjatuhkan satu sama lain. Mereka melaksanakan tugas kelompok tersebut sesuai pembagian tugasnya masing-masing dengan saling asah, asih, dan asuh.

Dalam dimensi berdemokrasi, dapat dicontohkan sebagaimana ketika peserta didik menghadapi masalah. Dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, guna mencapai titik temu mereka selalu menggunakan cara-cara penyelesaian bermusyawarah antarteman. Mereka tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain, dan tidak bersikap merasa dirinya yang paling benar.

Dimensi berkeadilan, dapat dimaknai sebagai upaya menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional). Dimensi ini konsep dasarnya adalah manusia dianggap tidak memiliki perbedaan satu sama lain secara hakiki, akan tetapi perbedaan tersebut didasarkan pada aspek-aspek tertentu secara

positif, misalnya, didasarkan pada kompetensi mereka masing-masing. Sebagai contoh, mereka dalam menentukan pimpinan kelasnya, mereka tidak mendasarkan atas dasar suka tidak suka, kedekatan dalam pertemanan, atau unsur-unsur negatif yang lain. Akan tetapi, mereka mendasarkan pada terpenuhinya kemampuan atau aspek-aspek lain sebagai syarat kepemimpinan yang dimiliki oleh teman yang dipilihnya.

Selain lima dimensi pada pilar warga Negara yang baik tersebut, masih terdapat tiga dimensi lagi, yaitu dimensi kooperatif, menjaga kelestarian lingkungan, dan taat pada peraturan. Dalam dimensi kooperatif, misalnya, peserta didik mau dan mampu berperan aktif dalam setiap kegiatan sekolah.

## KESIMPULAN

1. Perlunya kesamaan pemahaman kerangka teori, konsep dan prinsip-prinsip pendidikan budi pekerti untuk dipahami dengan baik oleh pimpinan, guru dan karyawan pada sekolah dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan pula dengan indikator keterlibatan guru dalam melakukan pengamatan dan mencatatnya pada lembar pengamatan siswa rata-rata sudah diatas 100 amatan per guru persemester
2. Penyusunan Kurikulum pendidikan budi pekerti serta pelaksanaannya.
  - a. Penyusunan kurikulum pendidikan budi pekerti yang terdiri dari pilar, dimensi dan indikator perilaku yang bisa diamati dan diukur sudah cukup baik, karena dalam pelaksanaannya guru dan karyawan dapat dengan mudah untuk mengidentifikasi perilaku baik dan perilaku buruk dan mudah pengukurannya baik saat dilihat, didengar maupun dirasakan. Walaupun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa indikator yang belum / tidak teramati dan hal ini perlu menjadi bahan evaluasi.
  - b. Pelaksanaan pendidikan budi pekerti sudah dapat dijalankan dengan baik dan tidak sulit dilakukan baik saat proses belajar mengajar di kelas maupun pada saat diluar jam belajar selama dilingkungan sekolah baik saat belum waktunya masuk jam sekolah maupun pada saat jam istirahat dan jam pulang.

- c. Adanya apresiasi dari orang tua siswa, karena selain mendapatkan raport tentang kemampuan akademik putra/putrinya juga mendapatkan raport pendidikan budi pekerti yang mendiskripsikan tentang Kejujuran, Tanggungjawab, Menghormati, Peduli, Sportif dan Warga Negara yang baik. Dan dilampirkannya perilaku yang negatif dan positif apa saja yang selama ini dilakukan putra/putrinya selama disekolah dan dilakukan antara siswa, orang tua dan guru, sehingga dapatterjalin komunikasi yang harmonis, karena ada diantaranya yang perilaku selama di sekolah berbeda dengan perilaku selama di rumah.

3. Pembuatan Software Sistem Informasi Manajemen untuk merekam semua catatan perilaku siswa sudah sangat baik, karena telah mampu merekam pengamatan siswa mulai masuk sampaidengan lulus, merekam keterlibatan guru dan karyawan dalam pelaksanaan pendidikan budi pekerti, dapat diidentifikasi pilar, dimensi dan indikator mana saja yang teramati, perilaku negatif maupun positif apa saja yang sering terjadi sampai dengan perkembangan perilaku positif maupun negatif dariwaktuke waktu ada atau tidaknya perubahan.
4. Keterlibatan dan kesungguhan pimpinan sekolah sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan budi pekerti.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 Jawa Timur, Universitas Wijaya Putra dan Mitra pelaksanaan program ini.

## REFERENSI

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 41 tahun 2007 tentang standar proses
- Saleh Soegiyanto, Indra, dkk., 2011. Pedoman Pendidikan Budi Pekerti Sekolah Wijaya Putra. Duta Aksara. Sidoarjo

Suparno, Paul, dkk, 2002 Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah : Suatu Tinjauan Umum. Yogyakarta

Suparno, Paul, dkk. 2003 Pendidikan Budi Pekerti untuk SMU-SMK, Yogyakarta

Tirtahardja, Umar dan Sulo, S.l. La. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta  
Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003.